JURNAL ABDIMAS INDONESIA Vol. 5, No. 3, 2025
E-ISSN 2797-2887
Copyright © 2025 The Author(s)

Efisiensi Peran SIPD RI Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bali

I Gusti Agung Ayu Dinda Setiadewi[1], Ni Luh Putu Sariani[2,]

[1,2] Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Penulis Korespondensi:
I Gusti Agung Ayu Dinda Setiadewi
dindasetiawedi1@gmail.com

Abstrak:

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, khususnya Sub Bidang Perbendaharaan, dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) secara optimal. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahapan: (1) persiapan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner awal untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pelatihan; (2) implementasi berupa pendampingan teknis penginputan data, pendokumentasian kendala, dukungan administrasi, dan sosialisasi internal mengenai penggunaan SIPD RI; serta (3) evaluasi untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan melalui perbandingan hasil survei awal dan akhir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 90% responden bersedia mengikuti pelatihan, dan terjadi peningkatan pemahaman pegawai terhadap SIPD RI. Kesalahan input data dapat diminimalisasi, serta kesadaran pegawai terhadap penggunaan fitur dasar sistem meningkat. Mayoritas responden (75%) mengharapkan perbaikan jaringan dan 15% mengusulkan pelatihan internal, yang menjadi dasar rekomendasi penguatan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur. Kegiatan ini memberikan kontribusi praktis berupa peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem digital, serta kontribusi teoritis dengan memperkuat konsep bahwa keberhasilan transformasi digital pada sektor publik memerlukan sinergi antara teknologi dan kesiapan sumber daya manusia.

Kata Kunci: *pengelolaan keuangan daerah, SIPD RI, pendampingan teknis, transformasi digital*

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Kualitas tata kelola keuangan yang baik mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran publik. Berdasarkan laporan kinerja BPKAD Kota Denpasar (2022), efisiensi pengelolaan keuangan menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik.

Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang terintegrasi guna mempercepat proses perencanaan, meningkatkan integrasi data, dan

Copyright © 2025 The Author(s)

mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan anggaran (Syuhada et al, 2024). Sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menghadirkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2019), sistem ini berfungsi untuk menyajikan data dan informasi terkait pembangunan, penganggaran, serta pengelolaan keuangan secara nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan diskusi di lapangan, implementasi SIPD RI masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering terjadi antara lain keterlambatan pencairan anggaran akibat kesalahan input data, gangguan server atau jaringan yang menghambat proses transaksi, lambatnya sinkronisasi data, serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum optimal dalam memanfaatkan fitur sistem. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran, ketidakefisienan alur kerja, dan meningkatnya risiko kesalahan administrasi (Kumalasari & Fanida, 2024).

Analisis situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan pendampingan teknis dan sosialisasi kepada pegawai, khususnya pada Sub Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Bali, yang secara langsung berperan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI. Berdasarkan survei awal, sebagian besar pegawai memiliki pemahaman dasar terhadap SIPD RI, namun masih membutuhkan peningkatan keterampilan, terutama dalam meminimalisasi kesalahan input data dan mengoptimalkan penggunaan fitur sistem. Selain itu, 90% responden menyatakan bersedia mengikuti sosialisasi atau pelatihan, sehingga pelaksanaan program pendampingan ini dinilai penting dan relevan.

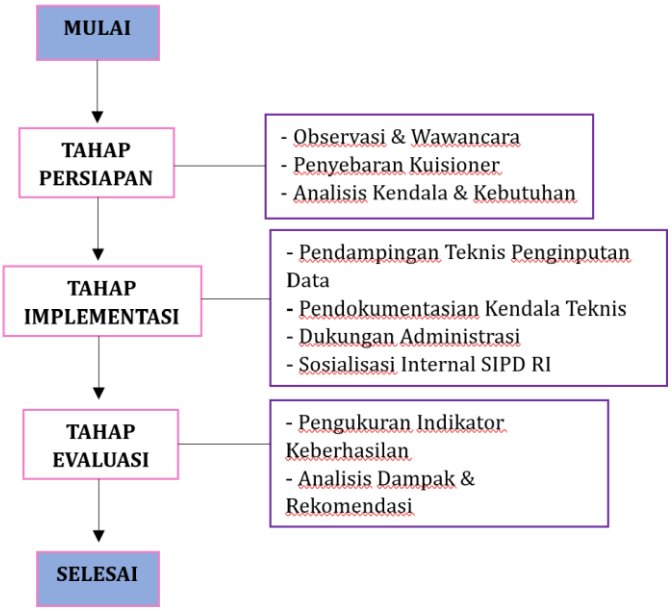
Program pengabdian ini memiliki beberapa tujuan utama: (1) meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam penggunaan SIPD RI; (2) meminimalisasi kesalahan teknis dalam penginputan data; (3) mendukung kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem digital. Manfaat kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi pegawai, tetapi juga pada penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 1 Juli hingga 10 Agustus 2025 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, pada Sub Bidang Perbendaharaan, Jl. Teuku Umar No.55, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah pegawai BPKAD Provinsi Bali, khususnya Sub Bidang Perbendaharaan, yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan melalui SIPD RI. Penentuan peserta dilakukan melalui koordinasi dengan pihak BPKAD dengan mempertimbangkan pegawai yang berperan sebagai operator SIPD RI serta yang membutuhkan peningkatan pemahaman terhadap penggunaan sistem.

Metode pelaksanaan pengabdian meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:



Tahap pertama pada tanggal 1 Juli hingga 10 Juli 2025 adalah persiapan, yang meliputi pengumpulan data awal, analisis permasalahan melalui observasi, wawancara, dan survei sederhana kepada pegawai terkait kendala penggunaan SIPD RI. Survei dilakukan menggunakan *Google Form* dengan fokus pada tingkat pemahaman pegawai, kendala teknis yang sering dihadapi, solusi yang diharapkan, serta kesediaan mengikuti pelatihan.

Kuesioner disusun dalam tiga bagian utama, yaitu:
(1) Identitas Responden, yang mencakup nama (opsional), unit kerja, jabatan, dan lama bekerja di BPKAD;
(2) Pemahaman dan Penggunaan SIPD RI, yang berisi pertanyaan terkait frekuensi penggunaan SIPD RI, bagian sistem yang paling sering digunakan, dan tingkat pemahaman pegawai terhadap sistem; serta
(3) Kendala dan Kebutuhan, yang mencakup kendala teknis yang sering dialami, frekuensi hambatan tersebut, serta kebutuhan pegawai dalam meningkatkan efektivitas penggunaan SIPD RI. Selain itu, kuesioner juga memuat pertanyaan mengenai kesediaan pegawai untuk mengikuti sosialisasi atau pelatihan terkait penggunaan SIPD RI.

Tahap berikutnya pada tanggal 15 Juli sampai dengan 31 Juli 2025 adalah implementasi kegiatan, yang dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas terstruktur untuk mendukung optimalisasi penggunaan SIPD RI di BPKAD Provinsi Bali. Kegiatan ini diawali dengan pendampingan teknis kepada pegawai dalam proses penginputan data ke dalam sistem. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan, seperti ketidaksesuaian nama rekening, *ID Billing* yang kadaluarsa, serta kegagalan validasi rekening. Upaya ini dilakukan secara langsung dengan memastikan setiap dokumen diverifikasi sebelum diinput ke dalam sistem.

Selanjutnya dilakukan pendokumentasian kendala teknis yang ditemukan selama proses penggunaan SIPD RI. Kendala tersebut meliputi gangguan *server*, sinkronisasi data yang lambat, dan kesalahan teknis saat transfer *online*. Pencatatan dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar untuk perbaikan sistem ke depannya.

Selain itu, kegiatan ini juga mencakup dukungan administrasi yang diberikan kepada pegawai, khususnya dalam penyiapan dokumen pendukung, pengarsipan, dan penyusunan kembali dokumen manual yang masih diperlukan dalam proses verifikasi.

Copyright © 2025 The Author(s)

Dukungan ini diberikan untuk mempercepat prosedur administrasi yang cenderung kompleks dan memerlukan ketelitian tinggi.

Tahapan terakhir pada tanggal 5 Agustus hingga 10 Agustus 2025 adalah pelaksanaan sosialisasi internal dalam bentuk pendampingan informal, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman pegawai mengenai langkah-langkah operasional SIPD RI. Materi yang disampaikan meliputi prosedur pengecekan status transaksi, validasi rekening, dan pemanfaatan fitur dasar sistem. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pegawai memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengoperasikan SIPD RI secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, dengan sasaran pegawai pada Sub Bidang Perbendaharaan yang mengelola keuangan daerah melalui SIPD RI. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner secara daring untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pegawai, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diharapkan. Partisipasi pegawai dalam kegiatan ini cukup tinggi, yang ditunjukkan pada gambar diagram 1 berikut.

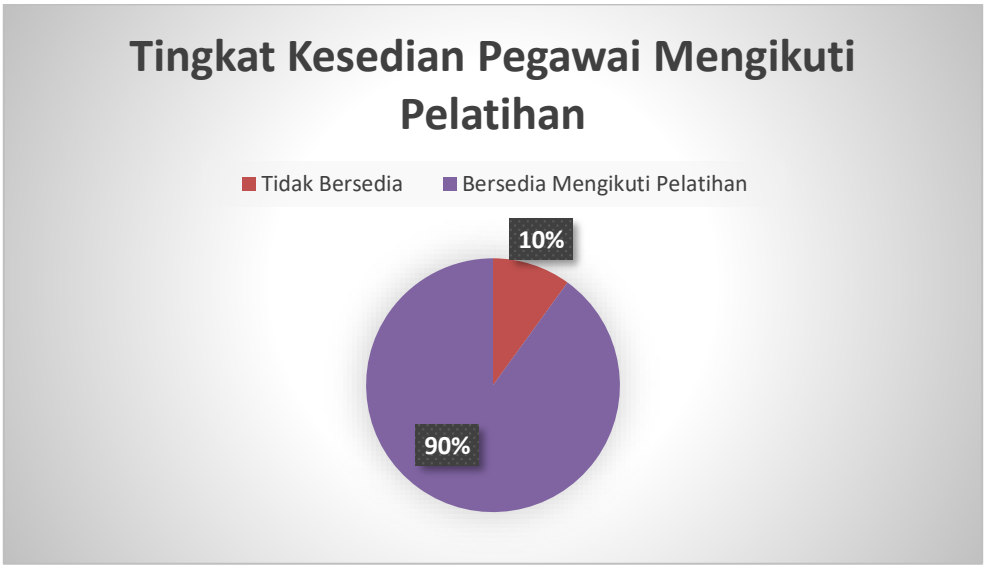


Diagram 1. Tingkat Kesediaan Pegawai Mengikuti Pelatihan

Dari segi partisipasi, berdasarkan diagram 1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai bersedia mengikuti pelatihan, dengan persentase sebesar 90%. Sementara itu, hanya 10% pegawai yang menyatakan tidak bersedia mengikuti pelatihan. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang diterapkan relevan dengan kebutuhan pegawai serta mampu menciptakan keterlibatan aktif dalam program pengabdian.

1. Tahap Persiapan

Hasil Survei

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 20 pegawai, diperoleh temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pegawai terhadap SIPD RI

Tingkat Pemahaman	Jumlah Responden	Persentase
Sangat paham	3	15%
Paham	7	35%
Cukup paham	10	50%
Kurang paham	0	0%
Tidak paham	0	0%
Total	**20**	**100%**

Berdasarkan hasil survei, mayoritas pegawai memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap penggunaan SIPD RI. Sebanyak 50% responden menyatakan cukup paham, 35% menyatakan paham, dan 15% menyatakan sangat paham. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai sudah memiliki dasar pemahaman, namun masih perlu peningkatan melalui pelatihan untuk memperdalam pengetahuan teknis dan optimalisasi fitur sistem.

Tabel 2. Kendala yang Sering Dialami dalam Penggunaan SIPD RI

Jenis Kendala	Jumlah Responden	Persentase
Gangguan server/jaringan	8	40%
Kesalahan input data	4	20%
Sinkronisasi data lambat	5	25%
Kurang familiar dengan fitur sistem	2	10%
Kendala lain (ID Billing, rekening, dsb)	1	5%
Total	**20**	**100%**

Permasalahan yang paling sering dihadapi oleh pegawai adalah gangguan server atau jaringan (40%) dan sinkronisasi data yang lambat (25%). Selain itu, terdapat kendala berupa kesalahan input data (20%), kurangnya pemahaman fitur sistem (10%), serta kendala teknis lain seperti ID Billing atau validasi rekening (5%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan bukan hanya dari sisi teknis sistem, tetapi juga dari sisi pengguna yang masih perlu peningkatan keterampilan.

Tabel 3. Solusi yang Diharapkan Pegawai untuk Optimalisasi SIPD RI

Solusi yang Diharapkan	Jumlah Responden	Persentase
Pelatihan/Workshop internal	3	15%
Panduan teknis (manual book)	0	0%
Peningkatan jaringan/server	15	75%

Copyright © 2025 The Author(s)

Penambahan tenaga operator khusus	2	10%
Total	**20**	**100%**

Berdasarkan data survei, mayoritas pegawai (75%) mengharapkan peningkatan jaringan atau server sebagai solusi utama untuk optimalisasi SIPD RI. Sebanyak 15% responden menyarankan pelatihan atau workshop internal, sedangkan 10% mengusulkan penambahan tenaga operator khusus. Tidak ada responden yang memilih panduan teknis *(manual book)* sebagai solusi.

Tabel 4. Kesediaan Mengikuti Sosialisasi/Pelatihan

Kesediaan Mengikuti Pelatihan	Jumlah Responden	Persentase
Ya	18	90%
Tidak	2	10%
Total	**20**	**100%**

Sebanyak 90% responden menyatakan bersedia mengikuti sosialisasi atau pelatihan, sedangkan hanya 10% yang menyatakan tidak bersedia. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi pegawai cukup tinggi, sehingga program pelatihan maupun sosialisasi berpotensi berjalan dengan baik dan efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap SIPD RI.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kendala disebabkan oleh keterbatasan jaringan serta kurangnya pemahaman mendalam terhadap beberapa fitur sistem. Informasi ini kemudian dikompilasi sebagai bahan masukan bagi unit kerja.

2. Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang dilakukan di Sub Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Bali. Fokus utama pada tahap ini adalah penerapan strategi pendampingan dan sosialisasi untuk mengatasi kendala yang ditemukan selama proses penggunaan SIPD RI. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, tahap implementasi dilaksanakan melalui beberapa aktivitas, yaitu pendampingan teknis, pendokumentasian kendala, dukungan administrasi, dan sosialisasi internal.

Pendampingan teknis dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan input data yang sebelumnya menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan keuangan berbasis SIPD RI. Kesalahan umum yang sering terjadi antara lain ketidaksesuaian nama rekening, ID Billing yang kadaluarsa, dan kegagalan validasi rekening. Selama kegiatan pendampingan, pegawai diberikan bimbingan langsung terkait prosedur pengecekan dokumen sebelum diinput ke sistem serta langkah-langkah validasi transaksi. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan adanya penurunan signifikan terhadap kesalahan input data. Pegawai menjadi lebih teliti dan memahami alur kerja dengan baik, sehingga waktu proses penginputan dapat dipercepat dan risiko keterlambatan pencairan anggaran berhasil ditekan. Temuan ini sejalan dengan teori organizational behavior yang menegaskan bahwa pendampingan teknis dapat meningkatkan keterampilan pengguna dan mengurangi kesalahan operasional dalam penerapan sistem berbasis teknologi (Robbins & Judge, 2014).

Selain pendampingan teknis, implementasi juga melibatkan pendokumentasian kendala teknis yang dialami pegawai selama penggunaan SIPD RI. Beberapa kendala yang dicatat antara lain gangguan jaringan, sinkronisasi data yang lambat, serta *error* pada proses transfer data online. Informasi ini kemudian dikompilasi dan dilaporkan kepada

pihak BPKAD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem. Data ini mengonfirmasi bahwa gangguan jaringan menjadi kendala dominan, sehingga diperlukan peningkatan infrastruktur untuk mendukung kelancaran sistem.



Gambar 1. Pendampingan Teknis Penggunaan SIPD RI

Pada aspek administrasi, dukungan diberikan melalui bantuan pengarsipan dan penyusunan kembali dokumen manual yang masih digunakan dalam proses verifikasi. Sebelum kegiatan pengabdian, proses administrasi memerlukan waktu yang cukup lama akibat kompleksitas prosedur dan keterbatasan sumber daya. Namun, setelah dilakukan dukungan administrasi, pengelolaan dokumen menjadi lebih tertata, sehingga mempercepat proses verifikasi dan mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini mendukung konsep efisiensi birokrasi yang disampaikan oleh Dwiyanto, (2018), di mana penyederhanaan alur kerja menjadi kunci peningkatan efektivitas kinerja sektor publik.



Gambar 2. Membantu dalam Pengelolaan Dokumen

Selain itu, kegiatan sosialisasi internal dilaksanakan secara informal melalui pendampingan langsung kepada pegawai. Materi yang disampaikan difokuskan pada prosedur penggunaan fitur dasar SIPD RI, seperti pengecekan status transaksi dan validasi rekening. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pegawai dalam mengoperasikan sistem. Pegawai yang sebelumnya kurang percaya diri dalam menggunakan fitur tertentu, kini mampu melakukan proses pengecekan transaksi dan validasi secara mandiri. Temuan ini mendukung konsep *capacity development* menurut United Nations Development Programme (2009), yang menekankan penguatan

Copyright © 2025 The Author(s)

kompetensi SDM untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mendukung reformasi digital di sektor publik



Gambar 3. Sosialisasi Internal Penggunaan Fitur SIPD RI

Secara keseluruhan, tahap implementasi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan pegawai. Pendampingan teknis berhasil menurunkan tingkat kesalahan input data, pendokumentasian kendala memberikan dasar evaluasi perbaikan sistem, dukungan administrasi mempercepat proses verifikasi, dan sosialisasi internal meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan SIPD RI. Kombinasi dari pendekatan teknis, administratif, dan edukatif ini terbukti efektif untuk mendukung optimalisasi penggunaan SIPD RI di BPKAD Provinsi Bali.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman pegawai serta efektivitas penggunaan SIPD RI. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pra-survei sebelum pendampingan dengan pasca-survei setelah pendampingan, yang difokuskan pada indikator tingkat pemahaman dan keterampilan pegawai, meminimalisasi kesalahan teknis, dan kelancaran administrasi.

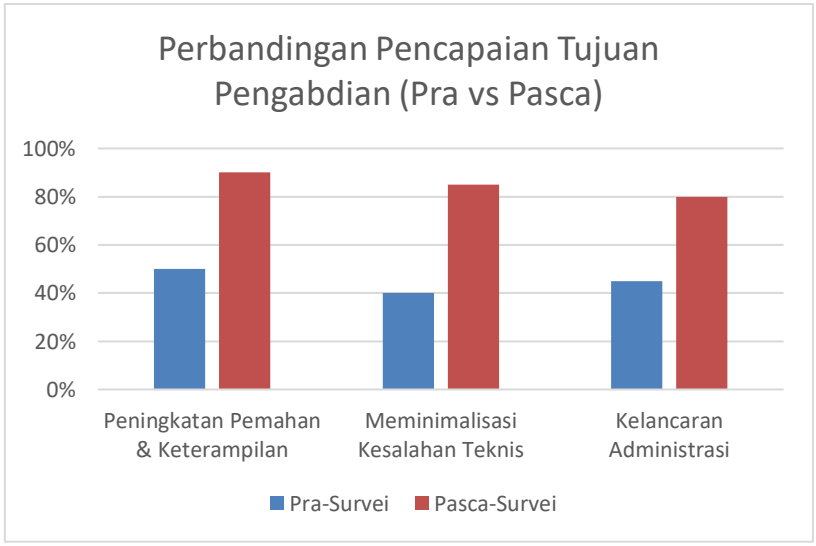


Diagram 2. Perbandingan Tingkat Pemahaman Pra dan Pasca Survei

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap tiga tujuan utama program pengabdian. Pada tujuan pertama, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam penggunaan SIPD RI, capaian meningkat dari sekitar 50% pada pra-survei menjadi 90% pada pasca-survei. Perubahan ini mengindikasikan bahwa pendampingan yang dilakukan efektif dalam memberikan pemahaman teknis, terutama terkait validasi rekening, pengecekan status transaksi, dan tata cara penginputan data di SIPD RI.

Pada tujuan kedua, yaitu meminimalisasi kesalahan teknis dalam penginputan data, terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Sebelum pendampingan, tingkat pencapaian tujuan ini berada pada kisaran 40%, yang menunjukkan masih banyaknya kesalahan teknis seperti ketidaksesuaian nama rekening, *ID Billing* kedaluwarsa, dan pengisian kolom yang tidak sesuai. Setelah pendampingan, capaian meningkat menjadi 85%, yang membuktikan bahwa strategi pendampingan teknis yang disertai pengecekan ulang dokumen sebelum input data mampu meningkatkan ketelitian pegawai dan menurunkan kesalahan input lebih dari 50%.

Sementara itu, tujuan ketiga, yaitu mendukung kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem digital, juga menunjukkan peningkatan dari 45% menjadi 80%. Hal ini sejalan dengan penurunan frekuensi laporan *error* jaringan setelah pegawai diberikan panduan praktis, seperti langkah mitigasi gangguan, pengaturan jadwal input, dan pencatatan *error* secara sistematis untuk dilaporkan ke admin pusat.

Simpulan

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di BPKAD Provinsi Bali ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap implementasi SIPD RI melalui pendampingan teknis, pendokumentasian kendala, serta sosialisasi internal. Hal baru dari kegiatan ini adalah penerapan pendekatan berbasis survei untuk memetakan kendala dan kebutuhan pegawai sebelum pelaksanaan pendampingan, sehingga solusi yang diberikan lebih tepat sasaran. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya ketelitian pegawai dalam penginputan data serta kesadaran akan pentingnya pemanfaatan fitur SIPD RI untuk efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Secara teoritis, kegiatan ini menguatkan konsep bahwa keberhasilan transformasi digital pada sektor publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk pengabdian berikutnya, disarankan agar dilakukan pelatihan teknis secara berkala yang terstruktur dengan modul pembelajaran, serta peningkatan keandalan infrastruktur jaringan guna mengurangi kendala teknis. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan panduan praktis *(manual book)* berbasis digital agar pegawai dapat mengakses informasi secara mandiri. Kegiatan evaluasi lanjutan juga sebaiknya dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang dari pelatihan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dan kepada pegawai Sub Bidang Perbendaharaan yang berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusinya dalam mendukung kelancaran program ini.

Copyright © 2025 The Author(s)

Referensi

BPKAD Kota Denpasar. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar*.

Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Kinerja Aparatur Pemerintah*. Gadjah Mada University Press.

Kumalasari, N. I., & Fanida, E. H. (2024). Peningkatan Kualitas Perencanaan Anggaran Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Studi Pada Efektivitas Penggunaan Platform SIPD di Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta). *Publika*, *12*(2), 381–394. https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p381-394

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). *Organizational Behavior*. Pearson Education.

Syuhada, F.F., Julian, C., Iriani, A., Chairani, A. L., & Austin, T. (2024). The Transformation of E-government Through The Regional Government Information System (SIPD) at The Regional Human Resource Development Agency of South Sumatra Province. *JURNAL ISIP VOICE : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(2), 11–18. https://doi.org/10.58222/jiv.v3i2.1021

United Nations Development Programme. (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. www.undp.org/capacity